PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Per 31 Desember 2019

LAMPIRAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ponorogo, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. SUMARNO, MM

NIP. 19650812 199202 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	: 4 . 03	Perencanaan
Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
!	**BELANJA**	14.124.217.000,00	13.077.545.535,00	92,59	0,00
! . 1	**BELANJA OPERASI**	13.493.217.000,00	12.462.610.040,00	92,36	0,00
! . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.202.628.000,00	5.921.406.147,00	95,47	0,00
! . 1 . 2	Belanja Barang	7.290.589.000,00	6.541.203.893,00	89,72	0,00
! . 2	**BELANJA MODAL**	631.000.000,00	614.935.495,00	97,45	0,00
! . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	436.000.000,00	425.435.495,00	97,58	0,00
! . 2 . 3	Belanja Bangunan dan Gedung	195.000.000,00	189.500.000,00	97,18	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.124.217.000,00)	(13.077.545.535,00)	92,59	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.124.217.000,00)	(13.077.545.535,00)	92,59	0,00

Ponorogo,

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Ir. SUMARNO, MM

NIP. 19650812 199202 1 004

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
5	**BELANJA**	14.124.217.000,00	13.077.545.535,00	92,59	13.327.479.192,00
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	13.493.217.000,00	12.462.610.040,00	92,36	12.604.116.792,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.422.488.000,00	3.320.591.147,00	97,02	2.763.484.186,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.070.729.000,00	9.142.018.893,00	90,78	9.840.632.606,00
5 . 2	**BELANJA MODAL**	631.000.000,00	614.935.495,00	97,45	723.362.400,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	436.000.000,00	425.435.495,00	97,58	431.482.400,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.000.000,00	189.500.000,00	97,18	291.880.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.124.217.000,00)	(13.077.545.535,00)	92,59	(13.327.479.192,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.124.217.000,00)	(13.077.545.535,00)	92,59	(13.327.479.192,00)

Ponorogo,

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Ir. SUMARNO, MM

NIP. 19650812 199202 1 004

Printed By SimDa

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 4 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

URAIAN	2019	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	3.651.500,00	2.714.450,00
JUMLAH ASET LANCAR	3.651.500,00	2.714.450,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih		
Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.279.262.930,64	6.864.524.550,64
Gedung dan Bangunan	4.687.167.236,00	4.497.667.236,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	78.790.000,00	78.790.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.541.034.643,00)	(5.932.039.569,00)
JUMLAH ASET TETAP	5.504.185.523,64	5.508.942.217,64
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	15.000.000,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.000.000,00)	(2.000.000,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	10.000.000,00	13.000.000,00

[illegible]	: 4 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
[illegible]	: 4 . 03 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
[illegible]	: 4 . 03 . 01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

URAIAN	2019	2018
[illegible] Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
[illegible] Beban	12.040.846,00	11.308.410,00
[illegible] Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
[illegible] JANGKA PENDEK	12.040.846,00	11.308.410,00
[illegible] JANGKA PANJANG		
[illegible] Dalam Negeri	0,00	0,00
[illegible] Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
[illegible] JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	**12.040.846,00**	**11.308.410,00**
[illegible]		
[illegible]	5.505.796.177,64	5.513.348.257,64
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**5.517.837.023,64**	**5.524.656.667,64**

Ponorogo,

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Ir. SUMARNO, MM

NIP. 19650812 199202 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	: 4 . 03	Perencanaan
Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	**PENDAPATAN - LO**	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**BEBAN**	13.077.839.938,00	13.123.670.781,00	(45.830.843,00)	(0,35)
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	3.320.591.147,00	2.763.484.186,00	557.106.961,00	20,16
9 . 1 . 2	Beban Persediaan	1.103.651.858,00	972.373.658,00	131.278.200,00	13,50
9 . 1 . 2	Beban Jasa	6.040.289.987,00	7.636.226.923,00	(1.595.936.936,00)	(20,90)
9 . 1 . 2	Beban Pemeliharaan	262.450.921,00	198.841.102,00	63.609.819,00	31,99
9 . 1 . 2	Beban Perjalanan Dinas	1.735.421.513,00	1.032.021.577,00	703.399.936,00	68,16
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	615.434.512,00	520.723.335,00	94.711.177,00	18,19
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(13.077.839.938,00)	(13.123.670.781,00)	45.830.843,00	(0,35)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(13.077.839.938,00)	(13.123.670.781,00)	45.830.843,00	(0,35)
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(13.077.839.938,00)	(13.123.670.781,00)	45.830.843,00	(0,35)

Ponorogo,

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Ir. SUMARNO, MM

NIP. 19650812 199202 1 004

Printed By Simda

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 4 . 03	Perencanaan
Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	5.513.348.257,64	4.907.949.846,64
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13.077.839.938,00)	(13.123.670.781,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Tetap SKPD	(7.257.677,00)	401.590.000,00
Koreksi ekuitas Aset Ekstrakomtable	0,00	0,00
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		
RJK PPKD	13.077.545.535,00	13.327.479.192,00
EKUITAS AKHIR	5.505.796.177,64	5.513.348.257,64

Ponorogo,

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Ir. SUMARNO, MM

NIP. 19650812 199202 1 004

LAPORAN KEUANGAN POKOK

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pendapatan pajak daerah				
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah				
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	Jumlah				
2.1	Belanja Operasi	13.493.217.000,00	12.462.610.040,00	92,36	12.604.116.792,00
2.1.1	Belanja Pegawai	3.422.488.000,00	3.320.591.147,00	97,02	2.763.484.186,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.070.729.000,00	9.142.018.893,00	90,78	9.840.632.606,00
2.2	Belanja Modal	631.000.000,00	614.935.495,00	97,45	723.362.400,00
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	436.000.000,00	425.435.495,00	97,58	431.482.400,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	195.000.000,00	189.500.000,00	97,18	291.880.000,00
2.2.4	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah	(14.124.217.000,00)	(13.077.545.535,00)	92,59	13.327.479.192,00
	Surplus / (Defisit)	(14.124.217.000,00)	(13.077.545.535,00)	92,59	13.327.479.192,00

Ponorogo, 31 Desember 2019

Kepala BAPPEDA LITBANG

Ir. SUMARNO, MM
NIP. 19650812 199202 1 004

B. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
NERACA BAPPEDA LITBANG
Per 31 Desember Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2019	Tahun 2018
ASET		
ASET LANCAR	0,00	0,00
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Pajak	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00
Persediaan	3.651.500,00	2.714.450,00
Jumlah	3.651.500,00	2.714.450,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan mesin	7.279.262.930,64	7.279.262.930,64
Gedung dan bangunan	4.687.167.236,00	4.687.167.236,00
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	78.790.000,00	78.790.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.541.034.643,00)	(5.932.039.569,00)
Jumlah	5.504.185.523,64	5.508.942.217,64
ASET LAINNYA		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti KerugianDaerah	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	15.000.000,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.000.000,00)	(2.000.000,00)
Jumlah Aset Lainnya	10.000.000,00	13.000.000,00
Jumlah	5.517.837.023,64	5.524.656.667,64
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Pajak	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka	0,00	0,00
Utang Beban	12.040.846,00	11.308.410,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
Jumlah	12.040.846,00	11.308.410,00
EKUITAS		
Ekuitas	5.505.796.177,64	5.513.348.257,64
Jumlah		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.517.837.023,64	5.524.656.667,64

Ponorogo, 31 Desember 2019

Kepala BAPPEDA LITBANG

Ir. SUMARNO, MM
NIP. 19650812 199202 1 004

C. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

LAPORAN OPERASIONAL

BAPPEDA LITBANG

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 dan 2018

Dalam Rupiah

URAIAN	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEBAN				
BEBAN OPERASI	13.077.839.938,00	13.123.670.781,00	(45.830.843,00)	(0,35)
Beban Pegawai - LO	3.320.591.147,00	2.763.484.186,00	557.106.961,00	20,16
Beban Persediaan	1.103.651.858,00	972.373.658,00	131.278.200,00	13,50
Beban Jasa	6.040.289.987,00	7.636.226.923,00	(1.595.936.936,00)	(20,90)
Beban Pemeliharaan	262.450.921,00	198.841.102,00	63.609.819,00	31.99
Beban Perjalanan Dinas	1.735.421.513,00	1.032.021.577,00	703.399.936,00	68,16
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	615.434.512,00	520.723.335,00	94.711.177,00	18,19
Beban Lain-lain				
JUMLAH BEBAN				
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(13.077.839.938,00)	(13.123.670.781,00)	45.830.843,00	(0,35)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13.077.839.938,00)	(13.123.670.781,00)	45.830.843,00	(0,35)

Ponorogo, 31 Desember 2019

Kepala BAPPEDA LITBANG

Ir. SUMARNO, MM

NIP. 19650812 199202 1 004

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAPPEDA LITBANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	5.513.348.257,64	4.907.949.846,64
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13.077.839.938,00)	(13.123.670.781,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Tetap SKPD	(7.257.677,00)	401.590.000,00
Koreksi Ekuitas lainnya	0,00	0,00
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		
R/K PPKD	13.077.545.535,00	13.327.479.192,00
EKUITAS AKHIR	5.505.796.177,64	5.513.348.257,64

Ponorogo, 31 Desember 2019

Kepala BAPPEDA LITBANG

Ir. SUMARNO, MM
NIP. 19650812 199202 1 004

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1) Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
2) Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3) Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2019 antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

9) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 7).
10) Peraturan Bupati Ponorogo nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 75).

c. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Memuat informasi tentang: Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan keuangan, pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan

BabVII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

a. Ekonomi Makro

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disamping merupakan salah satu indikator pembangunan regional juga sekaligus sebagai tolak ukur dalam melihat tingkat kemakmuran suatu daerah, karena PDRB menunjukkan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor - faktor produksi yang ikut berperan dalam suatu wilayah tersebut. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Ponorogo dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari trend kenaikan PDRB Kabupaten Ponorogo dari tahun-tahun sebelumnya. Angka PDRB Kabupaten Ponorogo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu tiga tahun terakhir adalah masing-masing mencapai 16.419 milyar rupiah (Tahun 2016) ,17.760 milyar rupiah (Tahun 2017) dan 19.257 milyar rupiah (Tahun 2018).

b. Kebijakan Keuangan

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah alokasinya menunggu penetapan dari Pemerintah Pusat.

Kebijakan internal yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan kemampuan petugas dan sumberdaya penerimaan.

2) Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran belanja program tahun-tahun sebelumnya dapat terlihat gambaran arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai pemerintah daerah. Belanja program merefleksikan niat atau arah pembangunan dan alokasi sumber daya pemerintah daerah dalam memperbaiki kondisi yang ada.

Perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Kelompok belanja tidak langsung selanjutnya dirinci kedalam jenis belanja Belanja pegawai, Sedangkan belanja langsung dirinci kedalam jenis belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

c. Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Ponorogo adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Berikut adalah capaian target kinerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2019 :

1. Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan
   Target kinerja : Terselenggaranya administrasi perkantoran sesuai SOP
   Pencapaian target kinerja : 100 %
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   Target kinerja : Terselenggaranya administrasi perkantoran sesuai SOP
   Pencapaian target kinerja : 100 %
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan
   Target kinerja : Terselenggaranya administrasi perkantoran sesuai SOP
   Pencapaian target kinerja : 100 %
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
   Target kinerja : Terselenggaranya administrasi perkantoran sesuai SOP
   Pencapaian target kinerja : 100 %
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan
   Target kinerja : Terselenggaranya administrasi perkantoran sesuai SOP
   Pencapaian target kinerja : 100 %
6. Penyediaan makanan dan minuman
   Target kinerja : Terselenggaranya administrasi perkantoran sesuai SOP
   Pencapaian target kinerja : 100 %
7. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   Target kinerja : Terselenggaranya administrasi perkantoran sesuai SOP
   Pencapaian target kinerja : 100 %
8. Pengadaan mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional
   Target kinerja : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
   Pencapaian target kinerja : 100 %
9. Pengadaan peralatan, perlengkapan gedung kantor dan rumah jabatan/rumah dinas
   Target kinerja : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
   Pencapaian target kinerja : 100 %
10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas
    Target kinerja : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak

fungsi

Pencapaian target kinerja : 100 %

11. Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional

Target kinerja : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

Pencapaian target kinerja : 100 %

12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor, rumah jabatan/rumah dinas

Target kinerja : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

Pencapaian target kinerja : 100 %

13. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas

Target kinerja : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

Pencapaian target kinerja : 100 %

14. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian tradisional/pakaian adat

Target kinerja : Peningkatan aparatur yang disiplin

Pencapaian target kinerja : 100 %

15. Pendidikan dan pelatihan formal

Target kinerja : Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

Pencapaian target kinerja : 100 %

16. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Target kinerja : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dengan tepat waktu

Pencapaian target kinerja : 100 %

17. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran

Target kinerja : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dengan tepat waktu

Pencapaian target kinerja : 100 %

18. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Target kinerja : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dengan tepat waktu

Pencapaian target kinerja : 100 %

19. Pengelolaan dan penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial

Target kinerja : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dengan tepat waktu

Pencapaian target kinerja : 100 %

20. Monitoring, evaluasi dan pelaporan APBD

Target kinerja : Ketepatan Pelaporan APBD

Pencapaian target kinerja : 100 %

21. Monitoring, evaluasi dan pelaporan BKK

    Target kinerja : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dengan tepat waktu

    Pencapaian target kinerja : 100 %

22. Monitoring, evaluasi dan pelaporan DAK

    Target kinerja : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dengan tepat waktu

    Pencapaian target kinerja : 100 %

23. Penyusunan rancangan RKPD

    Target kinerja : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dengan tepat waktu

    Pencapaian target kinerja : 100 %

24. Penyelenggaraan musrenbang RKPD

    Target kinerja : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dengan tepat waktu

    Pencapaian target kinerja : 100 %

25. Penyusunan KUA dan PPAS APBD

    Target kinerja : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dengan tepat waktu

    Pencapaian target kinerja : 100 %

26. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan

    Target kinerja : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dengan tepat waktu

    Pencapaian target kinerja : 100 %

27. Pendampingan Penyusunan Renja SKPD

    Target kinerja : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dengan tepat waktu

    Pencapaian target kinerja : 100 %

28. Verifikasi Program dan Kegiatan

    Target kinerja : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dengan tepat waktu

    Pencapaian target kinerja : 100 %

29. Penyusunan Perubahan RKPD

    Target kinerja : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dengan tepat waktu

    Pencapaian target kinerja : 100 %

30. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

    Target kinerja : Pelaksanaan dokumen RPJMD

    Pencapaian target kinerja : 100 %

31. Koordinasi E-Planning Kabupaten Ponorogo

    Target kinerja : Penyusunan dokumen perencanaan dan

pelaporan dengan tepat waktu

Pencapaian target kinerja : 100 %

32. Koordinasi Target Kinerja

Target kinerja : Capaian sasaran pembangunan dengan target kinerja SKPD

Pencapaian target kinerja : 100 %

33. Penyusunan Strategi Pemberantasan Korupsi Daerah

Target kinerja : Menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi

Pencapaian target kinerja : 100 %

34. Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran

Target kinerja : Program dan kegiatan yang sesuai antara perencanaan dan penganggaran

Pencapaian target kinerja : 100 %

35. Pendampingan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH)

Target kinerja : Kegiatan Perencanaan Pembangunan tepat waktu

Pencapaian target kinerja : 100 %

36. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Target kinerja : Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berkesinambungan

Pencapaian target kinerja : 100 %

37. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perekonomian

Target kinerja : Rekomendasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti SKPD

Pencapaian target kinerja : 100 %

38. Koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan

Target kinerja : Koordinasi dan sinkronisasi program kawasan agropolitan yang dilaksanakan

Pencapaian target kinerja : 100 %

39. Koordinasi Program Anti Kemiskinan (Anti Poverty Program / APP)

Target kinerja : Kesejahteraan kelompok masyarakat miskin

Pencapaian target kinerja : 100 %

40. Koordinasi pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (A-PPK)

Target kinerja : Pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (A-PPK) yang dilaksanakan

Pencapaian target kinerja : 100 %

41. Pemetaan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Target kinerja : Dokumen pemetaan lahan pertanian berkelanjutan

Pencapaian target kinerja : 100 %

42. Analisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo

Target kinerja : Dokumen analisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo

Pencapaian target kinerja : 100 %

43. Penyusunan Proyeksi Angka Inflasi Daerah

Target kinerja : Dokumen penyusunan proyeksi angka inflasi daerah

Pencapaian target kinerja : 100 %

44. Analisis kemampuan daya beli petani Kabupaten Ponorogo

Target kinerja : Dokumen analisis kemampuan daya beli petani

Pencapaian target kinerja : 100 %

45. Koordinasi pengembangan agrowisata dan agroindustri

Target kinerja : Pengembangan agrowisata dan agroindustri

Pencapaian target kinerja : 100 %

46. Koordinasi perencanaan dan pembangunan bidang sosial dan budaya

Target kinerja : Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya

Pencapaian target kinerja : 100 %

47. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya

Target kinerja : Rekomendasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang ditindaklanjuti SKPD

Pencapaian target kinerja : 100 %

48. Perencanaan pembangunan responsip gender (PPRG)

Target kinerja : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan responsip gender

Pencapaian target kinerja : 100 %

49. Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat

Target kinerja : Partisipasi aktif SKPD dalam koordinasi kabupaten/kota sehat

Pencapaian target kinerja : 100 %

50. Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat

Target kinerja : Titik pantau dalam verifikasi kabupaten/kota sehat

Pencapaian target kinerja : 100 %

51. Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

Target kinerja : Menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo

Pencapaian target kinerja : 100 %

52. Koordinasi Kabupaten Layak Anak (KLA)

Target kinerja : Terpenuhinya data Kabupaten Layak Anak

Pencapaian target kinerja : 100 %

53. Koordinasi Pencapaian SDG’s

Target kinerja : Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

Pencapaian target kinerja : 100 %

54. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan CSR Awards

Target kinerja : Perusahaan yang berperan serta terhadap pembangunan

di Kabupaten Ponorogo baik dari segi kualitas maupun kuantitas

Pencapaian target kinerja : 100 %

55. Penyusunan dokumen RAD SDG's

Target kinerja : Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

Pencapaian target kinerja : 100 %

56. Penyusunan naskah akademik peraturan daerah

Target kinerja : Dokumen naskah akademik peraturan daerah

Pencapaian target kinerja : 100 %

57. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan CSR

Target kinerja : Perusahaan yang berperan serta terhadap pembangunan di Kabupaten Ponorogo baik dari segi kualitas maupun kuantitas

Pencapaian target kinerja : 100 %

58. Penyusunan indeks gini Kabupaten Ponorogo

Target kinerja : Dokumen indeks gini Kabupaten Ponorogo

Pencapaian target kinerja : 100 %

59. Analisis kepuasan pelayanan publik Kabupaten Ponorogo

Target kinerja : Dokumen kepuasan pelayanan publik Kabupaten Ponorogo

Pencapaian target kinerja : 100 %

60. Penyusunan indeks disparitas wilayah

Target kinerja : Dokumen penyusunan indeks disparitas wilayah

Pencapaian target kinerja : 100 %

61. Analisis Pembangunan Manusia

Target kinerja : Dokumen analisis pembangunan manusia

Pencapaian target kinerja : 100 %

62. Koordinasi tim PPID

Target kinerja : Data pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang dikelola

Pencapaian target kinerja : 100 %

63. Koordinasi perencanaan bidang penelitian dan pengembangan

Target kinerja : Data bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan

Pencapaian target kinerja : 100 %

64. Pengelolaan system informasi pembangunan daerah (SIPD)

Target kinerja : Tercukupinya data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)

Pencapaian target kinerja : 100 %

65. Survey dan Pemetaan

Target kinerja : Tercukupinya data hasil survey

Pencapaian target kinerja : 100 %

66. Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah

Target kinerja : Dokumen indeks daya saing

Pencapaian target kinerja : 100 %

67. Penyusunan Potensi Daerah Kabupaten Ponorogo

Target kinerja : Dokumen potensi daerah

Pencapaian target kinerja : 100 %

68. Kajian Efektifitas Struktur Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Target kinerja : Dokumen kajian efektifitas struktur organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Pencapaian target kinerja : 100 %

69. Koordinasi Bidang Prasarana

Target kinerja : Terlaksananya koordinasi bidang prasarana

Pencapaian target kinerja : 100 %

70. Pendampingan Program BKKD

Target kinerja : Desa yang didampingi

Pencapaian target kinerja : 100 %

71. Koordinasi PAMSIMAS

Target kinerja : Desa yang dilayani program PAMSIMAS

Pencapaian target kinerja : 100 %

72. Koordinasi KOTAKU

Target kinerja : Kesejahteraan kelompok masyarakat miskin

Pencapaian target kinerja : 100 %

73. Koordinasi PPSP

Target kinerja : Terlaksananya kebutuhan sanitasi pemukiman

Pencapaian target kinerja : 100 %

74. Pendampingan Proses Legisiasi Penata Ruang

Target kinerja : Terpenuhinya dokumen Raperda Penataan Ruang

Pencapaian target kinerja : 100 %

75. Penyusunan KLHS RTRW Kabupaten Ponorogo

Target kinerja : Terpenuhinya dokumen KLHS RTRW Kabupaten Ponorogo

Pencapaian target kinerja : 100 %

76. Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Ngebel

Target kinerja : Dokumen penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata Ngebel

Pencapaian target kinerja : 100 %

77. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana

Target kinerja : Rekomendasi perencanaan pembangunan bidang prasarana yang ditindaklanjuti SKPD

Pencapaian target kinerja : 100 %

78. Penyusunan Master Plan kawasan wisata Ngebel

Target kinerja : Dokumen masterplan kawasan wisata Ngebel

Pencapaian target kinerja : 100 %

79. Tata batas area pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan lingkar telaga Ngebel

Target kinerja : Dokumen tata batas area pinjam pakai kawasan hutan untuk jalan lingkar telaga Ngebel

Pencapaian target kinerja : 100 %

80. Inventarisasi tegakan dan pembayaran kewajiban pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan lingkar telaga Ngebel

Target kinerja : Dokumen inventarisasi tegakan dan pembayaran kewajiban pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan lingkar telaga Ngebel

Pencapaian target kinerja : 100 %

3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

a. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2019 sebesar Rp 14.124.217.000,00 Sedangkan realisasi belanjanya sebesar Rp 13.077.545.535,00 (92,59%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.296.471.147,00 dan belanja langsung/program sebesar Rp 9.781.074.388,00

b. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

1) Masih belum optimalnya upaya penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah, sehingga upaya ekstensifikasi keberagaman Pendapatan Asli Daerah terus diupayakan;

2) Kontribusi pendapatan daerah dari Perusahaan Milik Daerah sebenarnya masih belum optimal.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal dilaksanakan dengan cara bijaksana yang artinya bahwa dalam rangka peningkatan PAD tidak terlalu membebani masyarakat, tapi sebaliknya dapat memberi gairah terhadap perekonomian masyarakat;

2) Perusahaan Daerah harus terus didorong untuk dapat mengembangkan usahanya, sehingga nantinya dapat bisa diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.

Adapun permasalahan umum Belanja Daerah yang dihadapi pada tahun 2019 adalah masih tingginya prosentase Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung (gaji) dalam komposisi Belanja Daerah, sehingga SKPD cukup sulit untuk mewujudkan seluruh program-programnya. Guna mengatasi permasalahan di atas maka diupayakan :

1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja dengan tanpa mengurangi kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2) Mengarahkan Belanja Kegiatan untuk mewujudkan program-program SKPD yang dinilai prioritas, sangat mendesak untuk segera direalisasikan dan sesuai dengan dokumen perencanaan daerah serta aspirasi masyarakat.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun Laporan Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

b. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai Tahun Anggaran 2015 dalam menyusun Laporan Keuangan telah menggunakan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan, Namun demikian dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

c. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan

(1) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan.

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Sedangkan Belanja melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban dan/atau pada saat terjadinya konsumsi aset dan/atau pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Transaksi dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut :

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, dengan terlebih dahulu memperhitungkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan / Net Realizible Value (NRV)

   Adapun Umur Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

   (1) Umur Piutang < 1 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;
   (2) Umur Piutang 1 s/d 2 tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 20%;
   (3) Umur Piutang ≥ 2 s/d5tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 40%;
   (4) Umur Piutang ≥5tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 100%.

   Adapun Umur Piutang Retribusi dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

   (1) Umur Piutang < 1 bulan prosentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;
   (2) Umur Piutang 1 s/d 3 bulan prosentase penyisihan Piutang adalah 40%;
   (3) Umur Piutang > 3 s/d12 bulan prosentase penyisihan Piutang adalah 80%;
   (4) Umur Piutang ≥1tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 100%.

   Adapun Umur Piutang Lainnya (Selain Piutang Pajak dan Retribusi) dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

   (1) Umur Piutang < 1 Tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;
   (2) Umur Piutang 1 s/d 2 Tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 10%;
   (3) Umur Piutang > 2 s/d 3 Tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 50%;
   (4) Umur Piutang ≥ 3tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 100%.

d. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/sitaan. Penyajian Persediaan dengan metode Perpetual untuk Obat-obatan sedangkan untuk Bahan Habis Pakai selain Obat menggunakan metode Periodik. Adapun penilaian Persediaan menggunakan metode Harga Terakhir.
e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Untuk Investasi Non Permanen Dana Bergulir penyajiannya di Neraca sebesar Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan (NRV);

   Kebijakan Akuntansi atas penetapan aging schedule, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir diragukan tertagih adalah sebagai berikut :

   (1) Umur Piutang < 3 bulan prosentase penyisihan Piutang adalah 0,5%;
   (2) Umur Piutang 3 s/d 6 bulan prosentase penyisihan Piutang adalah 20%;
   (3) Umur Piutang > 6 s/d12 bulan prosentase penyisihan Piutang adalah 60%;
   (4) Umur Piutang ≥ 1tahun prosentase penyisihan Piutang adalah 100%.

f. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam penyajian Aset Tetap di Neraca adalah sebesar Nilai Buku, yaitu Harga Perolehan setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Pada Tahun Anggaran 2019 juga telah melakukan kapitalisasi Aset Tetap dengan memperhitungkan tambahan umur Aset Tetap setelah kapitalisasi sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 75 Tahun 2019.

Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima Pemerintah Daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca.

Ekuitas Dana

Ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas antara lain terdiri dari sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dan Dana Cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

d. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

.....

.....

e. Penyajian Laporan Keuangan

a) Pelaporan Keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Bappeda Litbang dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
b) Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasikan
c) Transaksi dan kejadian diakui atas dasar akrual.
d) Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

a. Laporan Realisasi Anggaran

1) Belanja

Pada Tahun Anggaran 2019 untuk Belanja Daerah pada BAPPEDA LITBANG dianggarkan sebesar Rp 14.124.217.000,00 Sedangkan realisasinya sebesar Rp 13.077.545.535,00 atau kurang dari rencana sebesar 8 %. Sehingga terjadi sisa lebih anggaran sebesar Rp. 1.046.671.465,00

Secara rinci realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel xxxx
Rekapitulasi Target dan Realisasi Belanja-LRA APBD
Bappeda Litbang Tahun Anggaran 2019

No	Jenis Belanja	BELANJA		%	Realisasi Tahun 2018
		Anggaran 2019	Realisasi 2019		
II	**Belanja Operasi**	**13.493.217.000,00**	**12.462.610.040,00**	**92,36**	**12.604.116.792,00**
1	Belanja Pegawai	6.202.628.000,00	5.921.406.147,00	95,47	6.185.209.186,00
2	Belanja Barang	7.290.589.000,00	6.541.203.893,00	89,72	6.418.907.606,00
3					
II	**Belanja Modal**	**631.000.000,00**	**614.935.495,00**	**97,45**	**723.362.400,00**
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	436.000.000,00	425.435.495,00	97,58	431.482.400,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.000.000,00	189.500.000,00	97,18	291.880.000,00
3					
TOTAL		**14.124.217.000,00**	**13.077.545.535,00**	**92.59**	**13.327.479.192,00**

Penjelasan mengenai rincian belanja daerah sebagai berikut :

Belanja pada Bappeda Litbang terdiri dari :

a) Belanja Tidak Langsung berupa belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp 3.398.368.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 3.296.471.147,00

b) Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp 10.725.849.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 9.781.074.388,00 Belanja Langsung ini terdiri dari :

(1) Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp 2.804.260.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 2.624.935.000,00

(2) Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 7.290.589.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 6.541.203.893,00

(3) Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 631.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 614.935.495,00

Rincian atas belanja diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi
5	**BELANJA**	14.124.217.000,00	13.077545.535,00
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.398.368.000,00	3.296.471.147,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.398.368.000,00	3.296.471.147,00
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	10.725.849.000,00	9.781.074.388,00
5.2.1	Belanja Pegawai	2.804.260.000,00	2.624.935.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.290.589.000,00	6.541.203.893,00
5.2.3	Belanja Modal	631.000.000,00	614.935.495,00
	SURPLUS / DEFISIT	(14.124.217.000,00)	(13.077.545.535,00)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(14.124.217.000,00)	(13.077.545.535,00)

Dengan demikian secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Anggaran Belanja sebesar Rp 14.124.217.000,00 dikurangi Realisasi Belanja sebesar Rp 13.077.545.535,00 terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp 1.046.671.465,00

b. Neraca

Aset

1) Kas

	Tahun 2019	**Tahun 2018**
	Rp. 0,00	**Rp. 0,00**

Saldo Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00 terdiri dari

- Kas Di Bendahara Penerimaan	Rp	-
- Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
J u m l a h	Rp	0,00

a) Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan sebesar Rp…… merupakan ……

b) Kas Di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. ….. merupakan uang kas di ……..

2) Piutang Pajak

	Tahun 2019	**Tahun 2018**
	Rp.	**Rp. .....**

Saldo Piutang Pajak sebesar Rp ……. adalah merupakan tagihan/hak Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada wajib pajak atas surat ketetapan pajak (SKP) yang telah dikeluarkan, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum ada pelunasan.

Pajak Daerah yang belum atau kurang dibayar dan telah melewati jatuh tempo termasuk dalam nilai piutang diatas, akan tetapi belum ditetapkan nilai denda administrasi atas keterlambatan tersebut, sehingga tidak ada nilai piutang denda administrasi tersebut di Neraca.

Saldo Awal per 31 Desember 2018	Rp.
Penambahan tahun 2019	Rp.

Saldo	Rp.
Pengurangan Tahun 2019	Rp.

Saldo per 31 Desember 2019	Rp.

Penyisihan Piutang tdk tertagih Rp.

Jumlah Piutang yang dapat ditagih (NRV) Rp.

Jumlah Penyisihan Piutang berdasarkan umur Piutang Pajak adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		≤ 1 Tahun	>1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 5 Tahun	>5 Tahun
1.	Piutang Pendapatan	0,5%	20%	40%	100%
1.	Pajak.....	XXX	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH				

3) Persediaan **Tahun 2019** **Tahun 2018**

Rp. 3.651.500,00 **Rp. 2.714.450,00**

Saldo persediaan sebesar Rp 3.651.500,00 merupakan persediaan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

JENIS PERSEDIAAN	SALDO 31 DES 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2019
ATK	880.000,00	119.910.400,00	120.448.400,00	342.000,00
Cetakan dan Penggandaan	538.000,00	34.860.000,00	33.518.000,00	1.880.000,00
Peralatan Kebersihan	470.450,00	11.558.508,00	11.545.458,00	483.500,00
Alat Listrik dan Elektronika	709.000,00	9.129.000,00	9.162.000,00	676.000,00
Materai	117.000,00	4.020.000,00	3.867.000,00	270.000,00
JUMLAH	**2.714.450,00**	**179.477.908,00**	**178.540.858,00**	**3.651.500,00**

Atas Saldo Persediaan tersebut sebesar Rp 3.651.500,00, telah dilakukan Stock Opname pada tanggal 31 Desember 2019.

4) Aset Tetap

Tahun 2019 **Tahun 2018**

Rp. 5.504.185.523,64 **Rp. 5.508.942.217,64**

Aset Tetap Bappeda Litbang per 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.504.185.523,64 meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang terdiri dari :

	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.279.262.930,64	6.864.524.550,64
Gedung dan Bangunan	4.687.167.236,00	4.497.667.236,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.790.000,00	78.790.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.541.034.643,00)	(5.932.039.569,00)
Jumlah	**5.504.185.523,64**	**5.508.942.217,64**

Setelah menghitung Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, maka Nilai Aset Tetap Bappeda Litbang per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

1)	Tanah		Rp	0,00
2)	Peralatan dan Mesin	Rp 7.279.262.930,64		
	(Akumulasi Penyusutan)	(Rp 5.207.604.046,00)		
	Jumlah		Rp	2.071.658.884,64
3)	Gedung dan Bangunan	Rp 4.687.167.236,00		
	(Akumulasi Penyusutan)	(Rp 1.313.873.556,00)		
	Jumlah		Rp	3.373.293.680,00
4)	Jalan, Jaringan & Irigasi	Rp 78.790.000,00		
	(Akumlasi Penyusutan)	(Rp 19.557.041,00)		
	Jumlah		Rp	59.232.959,00
5)	Aset Tetap Lainnya		Rp	0,00
6)	Konstruksi Dalam Pengerjaan		Rp	0,00
			Rp	5.504.185.523,64
				==========

6.1. Tanah

Jumlah aset tanah milik SKPD ..... sebesar Rp.....yang terdiri dari:

Tabel..1. Saldo Aset Tanah Tahun 2018 dan 2019

TANAH	SALDO 31 DES 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2019
- Tanah				
JUMLAH				

Penambahan nilai tanah sebesar Rp……. merupakan realisasi belanja modal tanah Tahun 2019 sesuai harga perolehan sedangkan pengurangan sebesar Rp. ……. adalah pengadaan Tanah untuk…….

6.2. Peralatan dan Mesin

Jumlah peralatan dan mesin milik Bappeda Litbang sebesar Rp 7.279.262.930,64 terdiri dari :

Tabel. 2. Saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2018 dan 2019

PERALATAN DAN MESIN	SALDO 31 DES 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2019
Alat-alat Bantu	1.035.000,00	-	-	1.035.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	2.066.966.400,00	-	-	2.066.966.400,00
Alat Bengkel Bermesin	154.000.000,00	-	-	154.000.000,00

PERALATAN DAN MESIN	SALDO 31 DES 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2019
Alat Ukur	17.889.000,00	-	-	17.889.000,00
Alat Pengolahan	4.900.000,00	-	-	4.900.000,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Alat Kantor	598.674.984,29	7.922.000,00	-	606.596.984,29
Alat Rumah Tangga	875.075.325,53	59.884.630,00	-	934.959.955,53
Komputer	2.368.252.690,82	155.896.500,00	-	2.524.149.190,82
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	216.309.500,00	117.000.000,00	-	333.309.500,00
Alat Studio	315.859.450,00	71.123.250,00	-	386.982.700,00
Alat Komunikasi	189.113.000,00	2.912.000,00	-	192.025.000,00
Alat Kedokteran	6.250.000,00	-	-	6.250.000,00
Unit-unit Laboratorium	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	6.500.000,00	-	-	6.500.000,00
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	29.699.200,00	-	-	29.699.200,00
Alat Keamanan dan Perlindungan	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
JUMLAH	6.864.524.550,64	414.738.380,00	-	7.279.262.930,64

1. Alat Kantor bertambah sebesar Rp 7.922.000,00 berasal dari pengadaan belanja modal 1 unit Handel Genset berdasarkan SPK No. 602.1/1063/PBJ/405.29/2019 tgl. 20 Maret 2019.
2. Alat Rumah Tangga bertambah sebesar Rp 59.884.630,00 berasal dari pengadaan belanja modal 3 unit AC sebesar Rp 17.581.750,00 berdasarkan SPK No. 602.1/4004/PBJ/405.29/2019 tgl. 23 Oktober 2019 dan pengadaan belanja modal penutup jendela sebesar Rp 42.302.880,00 berdasarkan SPK No. 028/26.08/Sekret/405.29/2019 tgl 26 Agustus 2019.
3. Komputer bertambah sebesar Rp 155.896.500,00 berasal dari pengadaan belanja modal 3 unit Laptop dan 3 unit PC sebesar Rp 69.608.750,00 berdasarkan SPK No. 602.1/1063/PBJ/405.29/2019 tgl 20 Maret 2019, pengadaan belanja modal 4 unit PC dan 1 unit Laptop sebesar Rp 58.832.500,00 berdasarkan SPK No. 602.1/4004/PBJ/405.29/2019 tgl. 23 Oktober 2019, pengadaan belanja modal 2 unit Scanner sebesar Rp 7.630.750,00 berdasarkan SPK No. 602.1/1063/PBJ/405.29/2019 tgl. 20 Maret 2019, pengadaan belanja modal 1 unit harddisk sebesar Rp 9.902.500,00 berdasarkan SPK No. 602.1/4004/PBJ/405.29/2019 tgl. 23 Oktober 2019, pengadaan belanja modal 3 unit Acces Point Wifi sebesar Rp 7.922.000,00 berasarkan SPK No. 602.1/1063/PBJ/405.29/2019 tgl. 20 Maret 2019 dan pengadaan belanja modal 1 Roll Kabel sebesar Rp 2.000.000,00 berdasarkan SPK No. 602.1/4004/PBJ/405.29/2019 tgl. 23 Oktober 2019.

4. Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat bertambah sebesar Rp 117.000.000,00 berasal dari pengadaan belanja modal 2 unit Lemari Arsip sebesar Rp 58.250.000,00 berdasarkan SPK No. 602.1/1063/PBJ/405.29/2019 tgl 20 Maret 2019 dan 2 unit Lemari Arsip sebesar Rp 58.750.000,00 berdasarkan SPK No. 602.1/4004/PBJ/405.29/2019 tgl 23 Oktober 2019.
5. Alat Studio bertambah sebesar Rp 71.123.250,00 berasal dari pengadaan belanja modal 1 unit LCD Pro dan 2 unit Screen View sebesar Rp 17.824.500,00 berdasarkan SPK No. 602.1/1063/PBJ/405.29/2019 tgl 20 Maret 2019, pengadaan belanja modal 5 unit printer sebesar Rp 18.640.000,00 berdasarkan SPK No. 602.1/1063/PBJ/405.29/2019 tgl. 20 Maret 2019 dan 6 unit printer sebesar Rp 34.658.750,00 berdasarkan SPK No. 602.1/4004/PBJ/405.29/2019 tgl. 23 Oktober 2019.
6. Alat Kominikasi bertambah sebesar Rp 2.912.000,00 berasal dari pengadaan belanja modal 1 unit Mesin Fax sebesar Rp 2.912.000,00 berdasarkan SPK No. 602.1/4004/PBJ/405.29/2019 tgl. 23 Oktober 2019.

6.3. Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan milik Bappeda Litbang per 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.687.167.236,00 terdiri dari :

Tabel. 3. Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2018 dan 2019

Gedung dan Bangunan	SALDO 31 DES 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2019
Gedung Kantor	4.025.344.236,00	189.500.000,00	-	4.214.844.236,00
Gedung Tempat Kerja	472.323.000,00	-	-	472.323.000,00
JUMLAH	4.497.667.236,00	189.500.000,00	-	4.687.167.236,00

Penambahan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 189.500.000,00 merupakan realisasi belanja modal Tahun 2019 yang terdiri dari pembangunan sebesar Rp 178.500.000,00 sesuai harga perolehan berdasarkan SPK No. 602.1/3572/PBJ/405.29/2019 tgl. 23 September 2019, perencanaan sebesar Rp 6.500.000,00 berdasarkan SPK No. 028/3166/405.29/2019 tgl 27 Agustus 2019, dan pengawasan sebesar Rp 4.500.000,00 berdasarkan SPK No. 028/3571/405.29/2019 tgl. 23 September 2019.

6.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Bappeda Litbang sebesar Rp 78.790.000,00 terdiri dari :

Tabel. 4. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 dan 2019

Jalan, Irigasi dan Jaringan	SALDO 31 DES 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2019
Instalasi Pusat Pengatur Listrik	62.500.000,00	-	-	62.500.000,00
Jaringan Telepon Di Atas Tanah	16.290.000,00	-	-	16.290.000,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan	SALDO 31 DES 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2019
JUMLAH	78.790.000,00	-	-	78.790.000,00

Penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp……. merupakan realisasi belanja modal Tahun 2019 sesuai harga perolehan, Sedangkan pengurangan sebesar Rp. ……. adalah Reklas ke……/Penghapusan Aset sesuai SK. Bupati Nomor : Tahun 2019.

6.5. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap lainnya milik SKPD ..... sebesar Rp..... terdiri dari :

Tabel.5. Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 dan 2019

Aset Tetap Lainnya	SALDO 31 DES 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2019

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp……. merupakan realisasi belanja modal Tahun 2019 sesuai harga perolehan , Sedangkan pengurangan sebesar Rp. ……. adalah Reklas ke……/Penghapusan Aset sesuai SK. Bupati No. Tahun 2019.

6.6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Jumlah Aset Konstruksi dalam Pengerjaan milik SKPD ..... sebesar Rp..... terdiri dari :

Tabel.5. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018 dan 2019

Konstruksi dalam Pengerjaan	SALDO 31 DES 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2019

Penambahan nilai Aset Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp……. merupakan realisasi belanja modal Tahun 2019 atas aset sesuai harga perolehan , Sedangkan pengurangan sebesar Rp. ……. adalah Reklas ke Aset Tetap.

7. Aset Lainnya

Aset Lainnya Bappeda Litbang per 31 Desember 2019 sebesar Rp 15.000.000,00 terdiri dari :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018

	(Rp)	(Rp)
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	15.000.000,00
Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(5.000.000,00)	(2.000.000,00)
Jumlah	**10.000.000,00**	**13.000.000,00**

7.1 **Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**

Nilai Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tahun Anggaran 2019 adalah .....

7.2 Tuntutan Perbendaharaan

Nilai Tuntutan Perbendaharaan Tahun Anggaran 2019 adalah

7.3 Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Tagihan Tuntutan Ganti rugi Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah

7.4 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	**Rp**	**Rp**

Jumlah tersebut merupakan kemitraan dengan pihak ketiga sebagai berikut :

Aset dari kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp..... berasal dari *Built Operate and Transfer (BOT)* yaitu hak yang diperoleh atas bangunan ..... yang dibangun dengan cara kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan pihak swasta

8. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Nilai Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2019 adalah Rp. 15.000.000,00

9. Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2019 adalah **.....**

10. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2019 adalah 5.000.000,00

11. KEWAJIBAN

Kewajiban Bappeda Litbang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 12.040.846,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dengan rincian sebagai berikut :

10.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Bappeda Litbang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 12.040.846,00 terdiri dari :

a. Utang Beban Listrik Bulan Desember 2019 yang belum dibayar sebesar Rp 9.000.492,00 dan Telepon Bulan Desember 2019 yang belum dibayar sebesar Rp. 3.040.354,00

b. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. .....merupakan Utang .....

Jumlah tersebut merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi.

11. Ekuitas

1) Ekuitas **Tahun 2019** **Tahun 2018**

Rp. 5.505.796.177,64 **Rp. 5.513.348.257,64**

Ekuitas adalah kekayaan pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Bappeda Litbang per 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.505.796.177,64 turun 0,14 % dari saldo ekuitas per 31 Desember 2018.

c. LAPORAN OPERASIONAL

1. Beban pada Bappeda Litbang pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar (0,37%), dibandingkan Realisasi Beban tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 13.123.670.781,00. Kenaikan Beban terbesar adalah pada Beban Perjalanan Dinas, sedangkan penurunan Beban terbesar pada Beban Jasa Rp 1.595.936.936,00 sebesar (20,90) %. Hal ini disebabkan oleh.....

Secara rinci realisasi beban Bappeda Litbang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel xxxx
Perbandingan Beban Tahun 2019 dan 2018
BAPPEDA LITBANG

Kode Rek	Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan (Penurunan)	%
9	**BEBAN**	**13.077.839.938,00**	**13.123.670.781,00**	**(45.830.843,00)**	**(0,35)**
9 . 1	**BEBAN OPERASI**	**13.077.839.938,00**	**13.123.670.781,00**	**(45.830.843,00)**	**(0,35)**
9 . 1 . 1	Beban Pegawai – LO	3.320.591.147,00	2.763.484.186,00	557.106.961,00	**20,16**
9 . 1 . 2. 1	Beban Persediaan	1.103.651.858,00	972.373.658,00	131.278.200,00	13,50
9. 1. 2. 2	Beban Jasa	6.040.289.987,00	7.636.226.923,00	(1.595.936.936,00)	(20,90)
9. 1. 2. 3	Beban Pemeliharaan	262.450.921,00	198.841.102,00	63.609.819,00	31,99
9. 1. 2. 4	Beban Perjalanan Dinas	1.735.421.513,00	1.032.021.577,00	703.399.936,00	68,16
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	615.434.512,00	520.723.335,00	94.711.177,00	18,19
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2	**BEBAN TRANSFER**				
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				

Kode Rek	Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan (Penurunan)	%
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus				
9 . 3	**DEFISIT NON OPERASIONAL**	**(13.077.839.938,00)**	**13.123.670.781,00**	**(45.830.843,00)**	**(0,35)**
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO				
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO				
9.4	**BEBAN LUAR BIASA**	**(13.077.839.938,00)**	**13.123.670.781,00**	**(45.830.843,00)**	**(0,35)**
9.4.1	Beban Luar Biasa				

9.1. Beban Operasi

Tabel 9.1.1.
Realisasi Beban Operasi
Tahun 2019

No.	Beban	Jumlah (Rp)
1.	Beban Pegawai - LO	3.320.591.147,00
2.	Beban Persediaan	1.103.651.858,00
3.	Beban Jasa	6.040.289.987,00
4.	Beban Pemeliharaan	262.450.921,00
5.	Beban Perjalanan Dinas	1.735.421.513,00
6.	Beban Hibah	0,00
7.	Beban Bantuan Sosial	0,00
8.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	615.434.512,00
9.	Beban Penyisihan Piutang	0,00
10.	Beban Lain-lain	0,00
	Jumlah	**13.077.839.938,00**

1. Beban Pegawai

Dari Realisasi Beban Pegawai tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Gaji dan Tunjangan - LO	2.690.376.602,00
b. Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	606.094.545,00
c. Beban Uang Lembur - LO	24.120.000,00
d. Beban Pegawai BLUD	0,00
e. Beban Pegawai BOS	0,00

2. 1. Beban Persediaan

Dari Realisasi Beban Persediaan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Beban	2019 Jumlah (Rp)	2018 Jumlah (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1.	Beban Bahan Pakai Habis	145.022.858,00	130.308.158,00	14.714.700,00
2.	Beban Cetak dan Penggandaan	383.721.500,00	364.775.500,00	18.946.000,00
3.	Beban Makanan dan Minuman	533.907.500,00	453.290.000,00	80.617.500,00
4.	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	41.000.000,00	24.000.000,00	17.000.000,00
	Jumlah	1.103.651.858,00	972.373.658,00	131.278.200,00

2.2. Beban Jasa

Dari Realisasi Beban Jasa tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Beban	2019 Jumlah (Rp)	2018 Jumlah (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1.	Beban Jasa Kantor	356.487.384,00	237.639.923,00	118.847.461,00
2.	Beban Sewa Rumah/Gedung	7.536.849,00	7.472.500,00	64.349,00
3.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.	Beban Jasa Konsultasi	1.894.552.154,00	2.997.403.500,00	(1.102.851.346,00)
5.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BimTek PNS	142.200.000,00	50.000.000,00	92.200.000,00
6.	Beban Honorarium PNS - LO	2.771.815.000,00	3.381.275.000,00	(609.460.000,00)
7.	Beban Honorarium Non PNS - LO	601.648.600,00	740.352.000,00	(138.703.400,00)
8.	Beban Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	-	2.000.000,00
9.	Beban Jasa Pihak Ketiga	243.050.000,00	199.900.000,00	43.150.000,00
10.	Beban Barang ekstrakomtable	-	1.184.000,00	(1.184.000,00)
	Jumlah	6.040.289.987,00	7.636.226.923,00	(1.595.936.936,00)

2.3. Beban Pemeliharaan.

Dari Realisasi Beban Pemeliharaan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Beban	2019 Jumlah (Rp)	2018 Jumlah (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	152.500.921,00	111.163.102,00	41.337.819,00
2.	Beban Pemeliharaan	109.950.000,00	87.678.000,00	22.272.000,00
	Jumlah	262.450.921,00	198.841.102,00	63.609.819,00

2.4. Beban Perjalanan Dinas.

Dari Realisasi Beban Perjalanan Dinas tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Beban	2019 Jumlah (Rp)	2018 Jumlah (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.475.000,00	57.250.000,00	68.225.000,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.609.946.513,00	974.771.577,00	635.174.936,00
	Jumlah	1.735.421.513,00	1.032.021.577,00	703.399.936,00

3. Beban Hibah

Jumlah Beban hibah untuk Tahun 2019 sebesar Rp.....terdiri dari:

- Beban hibah uang Rp
- Beban hibah barang Rp

Jumlah Beban hibah Rp

4. Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2019 sebesar Rp.....terdiri dari:

- Beban Bantuan sosial dalam bentuk uang Rp
- Beban bantuan sosial dalam bentuk barang Rp

Jumlah Beban bantuan sosial Rp

5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan sebesar Rp 615.434.512,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 9.1.1.d.
Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2019

No.	Penyusutan Aset	2019 Jumlah (Rp)	2018 Jumlah (Rp.)	Kenaikan / Penurunan
1	Peralatan dan Mesin	513.838.875,00	424.537.385,00	89.301.490,00
2	Gedung dan Bangunan	95.281.137,00	90.871.450,00	4.409.687,00
3	Jalan Jaringan dan Irigasi	3.314.500,00	3.314.500,00	0,00
4	Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00
5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
	JUMLAH	**615.434.512,00**	**520.723.335,00**	**94.711.177,00**

6. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 sebesar Rp.....merupakan penyisihan piutang pada SKPD..... Rinciannya sebagai berikut:

7. Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain sebesar Rp.....dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 9.1.1.e
Realisasi Beban Lain-lain
Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Total Jumlah	

Beban pada Bappeda Litbang pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar (5,04) %, dibandingkan Realisasi Beban tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 13.123.670.781,00. Kenaikan Beban terbesar adalah pada Beban Perjalanan Dinas, sedangkan penurunan Beban terbesar pada Beban Jasa Rp 1.595.936.936,00 sebesar (20,90) % , hal ini disebabkan....., sedangkan Penurunan Beban terbesar Tahun 2019 pada Beban.....

Dengan demikian terjadi Surplus/Defisit LO Tahun 2019 sebesar Rp.....

d. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Saldo awal kekayaan bersih (Ekuitas) Bappeda Litbang per 1 Januari 2019 sebesar Rp 5.513.348.257,64 , kemudian ditambah/dikurangi Surplus/Defisit Laporan Operasional sebesar (Rp

13.077.839.938,00) dan adanya Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar (Rp 7.257.677,00) , maka diperoleh Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.505.796.177,64

Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar (Rp 7.257.677,00) dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Koreksi ekuitas asset tetap SKPD	(7.257.677,00)
2		
3		
	Total Jumlah	**(7.257.677,00)**

Koreksi ekuitas asset tetap SKPD sebesar (Rp. 7.257.677,00) terdiri atas :

1. Koreksi tambah nilai ekuitas asset tetap SKPD atas penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja TA 2019 sebesar Rp. 3.439.438,00
2. Koreksi kurang nilai ekuitas asset tetap SKPD atas penghapusan belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat rumah tangga lainnya karena pembelian barang tersebut belum memenuhi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10.697.115,00

6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo berdomisili di Jalan Aloon-Aloon Utara No. 4 Ponorogo sedangkan untuk Perda pembentukannya adalah Perda No. 11 Tahun 2008.

b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokok

Tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah melaksanakan Penyusunan dan Kebijaksanaan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Adapun fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah:

- Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan operasional

Undang-undang yang menjadi dasar kegiatan operasional di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Pada Tahun 2019 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tidak terjadi penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan.

e. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Tidak terdapat penggabungan atau pemekaran SKPD terkait penerapan PP 18/2018

f. Kejadian yang mempunyai dampak sosial

Dalam tahun 2019 tidak terdapat kejadian luar biasa dan berdampak sosial yang harus ditanggung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

PENUTUP

Sebagai salah satu bagian dari dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019, maka Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ini selain menjelaskan secara verbal dari realisasi perangkaan dari Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah serta Pembiayaan, juga menjelaskan secara garis besar dari pelaksanaan program dan kegiatan SKPD di Tahun Anggaran 2019.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019 ini berada dalam masa transisi dan adaptasi terhadap perubahan tata perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga apabila masih ada kekurangan itu adalah sesuatu hal yang wajar dan manusiawi. Namun demikian bukan berarti eksekutif mencari alasan sebagai pembenar apabila dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini ada kekurangan dan kesalahan, yang terpenting disini adalah adanya kemauan dan kerja keras untuk mencapai mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang ***akuntabel*** dan ***transparan***.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini, semoga dapat memperjelas semua pihak dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019.

Ponorogo, 31 Desember 2019

KEPALA BAPPEDA LITBANG

Ir. SUMARNO, MM

NIP. 19650812 199302 1 004

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Unit Organisasi : 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 4.03 . 4.03.01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI s/d PERIODE LALU	REALISASI PERIODE INI	REALISASI TOTAL	LEBIH / (KURANG)
5	**BELANJA**	14.124.217.000,00	0,00	13.077.545.535,00	13.077.545.535,00	(1.046.671.465,00)
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	13.493.217.000,00	0,00	12.462.610.040,00	12.462.610.040,00	(1.030.606.960,00)
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	3.422.488.000,00	0,00	3.320.591.147,00	3.320.591.147,00	(101.896.853,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.737.496.000,00	0,00	2.690.376.602,00	2.690.376.602,00	(47.119.398,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.168.898.000,00	0,00	2.126.792.847,00	2.126.792.847,00	(42.105.153,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga	192.034.000,00	0,00	189.292.669,00	189.292.669,00	(2.741.331,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan	192.397.000,00	0,00	194.350.000,00	194.350.000,00	1.953.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	68.635.000,00	0,00	66.195.000,00	66.195.000,00	(2.440.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	107.413.000,00	0,00	105.660.780,00	105.660.780,00	(1.752.220,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.086.000,00	0,00	8.053.923,00	8.053.923,00	(32.077,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	33.000,00	0,00	31.383,00	31.383,00	(1.617,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	660.872.000,00	0,00	606.094.545,00	606.094.545,00	(54.777.455,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tingkat Kehadiran dan Disiplin Kerja	660.872.000,00	0,00	606.094.545,00	606.094.545,00	(54.777.455,00)
5 . 1 . 1 . 07	Belanja Uang Lembur	24.120.000,00	0,00	24.120.000,00	24.120.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 07 . 01	Belanja Uang Lembur PNS	24.120.000,00	0,00	24.120.000,00	24.120.000,00	0,00
5 . 1 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.070.729.000,00	0,00	9.142.018.893,00	9.142.018.893,00	(928.710.107,00)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	163.530.300,00	0,00	144.617.908,00	144.617.908,00	(18.912.392,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	138.168.500,00	0,00	119.910.400,00	119.910.400,00	(18.258.100,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.129.000,00	0,00	9.129.000,00	9.129.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	(480.000,00)
5 . 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.732.800,00	0,00	11.558.508,00	11.558.508,00	(174.292,00)
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	364.590.000,00	0,00	355.754.948,00	355.754.948,00	(8.795.052,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	40.000.000,00	0,00	42.915.142,00	42.915.142,00	2.915.142,00
5 . 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	102.000.000,00	0,00	96.611.006,00	96.611.006,00	(5.388.994,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 06	Belanja Jasa Kantor Khusus	6.125.000,00	0,00	6.121.000,00	6.121.000,00	(4.000,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 08	Belanja Jasa Pengelolaan Kebersihan	37.500.000,00	0,00	33.453.800,00	33.453.800,00	(4.046.200,00)
5 . 1 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Pengelolaan Air Bersih	46.375.000,00	0,00	46.354.000,00	46.354.000,00	(21.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 2 . 25 . 02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (POKJA ULP)	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 25 . 03	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	242.100.000,00	0,00	171.000.000,00	171.000.000,00	(71.100.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 04	Belanja Honorarium Pengelola Kegiatan	115.100.000,00	0,00	111.200.000,00	111.200.000,00	(3.900.000,00)
5 . 1 . 2 . 25 . 05	Honorarium Sekretariat Kegiatan	271.400.000,00	0,00	237.625.000,00	237.625.000,00	(33.775.000,00)
5 . 1 . 2 . 26	Honorarium Non PNS	605.000.000,00	0,00	601.648.600,00	601.648.600,00	(3.351.400,00)
5 . 1 . 2 . 26 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	443.600.000,00	0,00	443.598.600,00	443.598.600,00	(1.400,00)
5 . 1 . 2 . 26 . 03	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan Non PNS	161.400.000,00	0,00	158.050.000,00	158.050.000,00	(3.350.000,00)
5 . 1 . 2 . 31	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 31 . 01	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (peralatan dapur, dll)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 32	Belanja Jasa Pihak Ketiga	243.050.000,00	0,00	243.050.000,00	243.050.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 32 . 03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 32 . 06	Belanja Jasa Lainnya (penjaga portal, cleaning service, penjaga malam, satpam, sopir, dll)	243.050.000,00	0,00	243.050.000,00	243.050.000,00	0,00
5 . 2	**BELANJA MODAL**	631.000.000,00	0,00	614.935.495,00	614.935.495,00	(16.064.505,00)
5 . 2 . 2	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	436.000.000,00	0,00	425.435.495,00	425.435.495,00	(10.564.505,00)
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.000.000,00	0,00	7.922.000,00	7.922.000,00	(78.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	0,00	7.922.000,00	7.922.000,00	(78.000,00)
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	71.000.000,00	0,00	70.581.745,00	70.581.745,00	(418.255,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	18.000.000,00	0,00	17.581.750,00	17.581.750,00	(418.250,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.000.000,00	0,00	52.999.995,00	52.999.995,00	(5,00)
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	162.000.000,00	0,00	155.896.500,00	155.896.500,00	(6.103.500,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	132.000.000,00	0,00	128.441.250,00	128.441.250,00	(3.558.750,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	20.000.000,00	0,00	17.533.250,00	17.533.250,00	(2.466.750,00)
5 . 2 . 2 . 16 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	10.000.000,00	0,00	9.922.000,00	9.922.000,00	(78.000,00)
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	120.000.000,00	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	(3.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	120.000.000,00	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	(3.000.000,00)

nted By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	72.000.000,00	0,00	71.123.250,00	71.123.250,00	(876.750,00)
5.2.2.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	18.000.000,00	0,00	17.824.500,00	17.824.500,00	(175.500,00)
5.2.2.18.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	54.000.000,00	0,00	53.298.750,00	53.298.750,00	(701.250,00)
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	3.000.000,00	0,00	2.912.000,00	2.912.000,00	(88.000,00)
5.2.2.19.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	3.000.000,00	0,00	2.912.000,00	2.912.000,00	(88.000,00)
5.2.3	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	195.000.000,00	0,00	189.500.000,00	189.500.000,00	(5.500.000,00)
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	195.000.000,00	0,00	189.500.000,00	189.500.000,00	(5.500.000,00)
5.2.3.01.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	195.000.000,00	0,00	189.500.000,00	189.500.000,00	(5.500.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(14.124.217.000,00)	0,00	(13.077.545.535,00)	(13.077.545.535,00)	1.046.671.465,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(14.124.217.000,00)	0,00	(13.077.545.535,00)	(13.077.545.535,00)	1.046.671.465,00

Ponorogo,

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO

Ir. SUMARNO, MM

NIP. 19650812 199202 1 004

Printed By SimDa

Jenis Persediaan	Saldo Akhir 2018 (Audited)	Penyesuaian Persed 2018		Mutasi Masuk Persediaan 2019		Mutasi Keluar Persediaan 2019		Saldo Akhir 31 Des 2019	No dan Tgl Berita Acara Stock Opname Persediaan 31 Des 2019	Keterangan
		Tambah	Kurang	Belanja Persediaan (Sesuai LRA 31-12-2019)	Hibah/Dropping Masuk Barang Persediaan (Jika Ada)	Pemakaian 2019	Persediaan Hilang/Rusak/ Kadaluarsa			
2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+4-5+6+7-8-9	11	12
kantor	880.000			119.910.400		120.448.400		342.000	BASO No. 050/4945/405.29/2019 Tgl 31 Des 2019	
/Adm Tender				-		-		-		
dan Elektronik (Lampu dll)	709.000			9.129.000		9.162.000		676.000	BASO No. 050/4945/405.29/2019 Tgl 31 Des 2019	
Materai dan Benda Pos	117.000			4.020.000		3.867.000		270.000	BASO No. 050/4945/405.29/2019 Tgl 31 Des 2019	
ebersihan & Bahan Pembersih	470.450			11.558.508		11.545.458		483.500	BASO No. 050/4945/405.29/2019 Tgl 31 Des 2019	
								-		
abung Pemadam Kebakaran								-		
abung Gas								-		
n Pertukangan								-		
Kedokteran/Perawatan aboratorium								-		
Bahan Makanan								-		
Kantor (papan nama, penunjuk apan data dst)								-		
lat peraga								-		
ial								-		
angunan								-		
anaman								-		
								-		
batan								-		
								-		
n Pokok								-		
olah/Kedokteran/Kesehatan								-		
bhan/Peraga/Praktek /Bimtek								-		
								-		
ik								-		
								-		
antor (papan nama, penunjuk n data dst)								-		
	538.000			34.860.000		33.518.000				

minuman Tamu								-		
minuman Pelatihan								-		
minuman Kesehatan				-		-		-		
minuman kegiatan/lembur				8.220.000		8.220.000		-		
dan atributnya								-		
arian (PSH)								-		
engkap (PSL)								-		
Harian (PDH)								-		
Upacara (PDU)								-		
								-		
								-		
apangan								-		
aerah								-		
radisional				41.000.000		41.000.000		-		
aga								-		
(pramuka, muslim, praktek)								-		
serahkan Ke Pihak ke-3/Masy								-		
								-		
Jumlah	**2.714.450**	-	-	**1.104.588.908**	-	**1.103.651.858**	-	**3.651.500**		

Sisa Persediaan Total Mencakup Sisa Persediaan Yang ada pada **KELURAHAN**. Untuk itu diperlukan BASO Per Kelurahan dan Laporan Rekap Tersendiri Yang Perlu Disiapkan Kecamatan.

Utang	Saldo Akhir 2018 (Audited)	Penyesuaian Utang 2018		Pembayaran Utang 2018		Status Utang (Lunas/Belum)	Pengakuan Utang Tahun 2019		Saldo Akhir 31 Des 2019	Keterangan
		Tambah	Kurang	Jumlah (Rp)	No dan Tgl Bukti		Jumlah (Rp)	No dan Tgl Bukti		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+4-5-6+9	11
ik	8.459.066	-	-	8.459.066	SP2D LS No: 000033/LSB/2019 Tgl 17-01-2019	Lunas	9.000.492	Tagihan Tgl. 6 Januari 2020	9.000.492	Saldo Utang Beban Listrik Rp. 9.000.492,00 mrp pemakaian listrik bulan Desember 2019 yang ditagihkan Bln Januari 2020
pon	2.654.444	-	-	2.654.444	Bukti Pengeluaran GU No: 02/403010102/PBP/01/2019 Tgl 15-01-2019	Lunas	3.040.354	Tagihan bln Januari 2020	3.040.354	Saldo Utang Beban telp Rp. 3.040.354,00 mrp pemakaian telp bulan Desember 2019 yang ditagihkan Bln Januari 2020
net	194.900	-	-	194.900	Bukti Pengeluaran GU No: 03/403010102/PBP/01/2019 Tgl 15-01-2019	Lunas				
	11.308.410	-	-	**11.308.410**			12.040.846		12.040.846	

Ponorogo, 06 Januari 2020
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(Ir. SUMARNO, MM)

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

SALDO BUKU BESAR

per 31 Desember 2019

Urusan Pemerintahan	:	4 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Unit Organisasi	:	4 . 03 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	:	4 . 03 . 01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	0,00	0,00
1 . 1 . 03 . 02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	0,00	0,00
1 . 1 . 4 . 06 . 01	Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1 . 1 . 7 . 01 . 01	Persediaan Alat Tulis Kantor	342.000,00	0,00
1 . 1 . 7 . 01 . 03	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	676.000,00	0,00
1 . 1 . 7 . 01 . 04	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	0,00
1 . 1 . 7 . 01 . 05	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	483.500,00	0,00
1 . 1 . 7 . 01 . 09	Persediaan barang cetak, karcis dll	1.880.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 03 . 05	Alat-alat Bantu Pompa	1.035.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 04 . 01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.690.894.400,00	0,00
1 . 3 . 2 . 04 . 02	Kendaraan Bermotor Penumpang	(6.750.000,00)	0,00
1 . 3 . 2 . 04 . 05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	382.822.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 09 . 01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	154.000.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 11 . 01	Alat Ukur universal	11.139.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 11 . 08	Alat Ukur/Pembanding	6.750.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 12 . 07	Alat Pasca Panen	4.900.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 13 . 03	Alat Penyimpanan	2.000.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 14 . 01	Mesin Tik	9.628.993,47	0,00
1 . 3 . 2 . 14 . 02	Mesin Hitung/Jumlah	17.100.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 14 . 03	Alat Reproduksi (Pengganda)	104.937.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 14 . 04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	210.510.990,82	0,00
1 . 3 . 2 . 14 . 05	Alat Kantor Lainnya	264.420.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 15 . 01	Meubelair	307.846.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 15 . 03	Alat Pembersih	4.790.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 15 . 04	Alat Pendingin	280.798.228,59	0,00
1 . 3 . 2 . 15 . 06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	341.525.726,94	0,00
1 . 3 . 2 . 16 . 01	Komputer Unit/Jaringan	51.550.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 16 . 02	Personal Komputer	1.572.997.043,88	0,00
1 . 3 . 2 . 16 . 03	Peralatan Komputer Mainframe	3.926.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 16 . 04	Peralatan Mini Komputer	59.615.250,00	0,00
1 . 3 . 2 . 16 . 05	Peralatan Personal Komputer	369.799.500,00	0,00
1 . 3 . 2 . 16 . 06	Peralatan Jaringan	466.261.396,94	0,00
1 . 3 . 2 . 17 . 01	Meja Kerja Pejabat	62.553.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 17 . 03	Kursi Kerja Pejabat	39.600.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 17 . 04	Kursi Rapat Pejabat	19.806.500,00	0,00
1 . 3 . 2 . 17 . 05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1.700.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 17 . 06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	19.300.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 17 . 07	Lemari dan Arsip Pejabat	190.350.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 18 . 01	Peralatan Studio Visual	233.024.050,00	0,00
1 . 3 . 2 . 18 . 02	Peralatan Studio Video dan Film	14.473.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 18 . 03	Peralatan Studio Video dan Film A	52.070.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 18 . 04	Peralatan Cetak	77.865.650,00	0,00
1 . 3 . 2 . 18 . 06	Peralatan Pemetaan Ukur	9.550.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 19 . 01	Alat Komunikasi Telephone	189.025.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 19 . 06	Alat Komunikasi Sosial	3.000.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 21 . 08	Alat Kedokteran Bedah	6.250.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 23 . 47	Alat Laboratorium Pertanian A	3.000.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 24 . 04	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Lanjutan	600.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 24 . 05	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah	1.400.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 26 . 04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Recorder Display	6.500.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 30 . 03	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Aqquistion and Analyzing System	29.699.200,00	0,00

Urusan Pemerintahan	: 4 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	
Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
Sub Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1 3 . 3 . 01 . 01	Bangunan Gedung Kantor	4.214.844.236,00	0,00
1 3 . 3 . 01 . 27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	472.323.000,00	0,00
1 3 . 4 . 16 . 03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	62.500.000,00	0,00
1 3 . 4 . 22 . 01	Jaringan Telepon Di atas Tanah	16.290.000,00	0,00
1 3 . 7 . 01 . 03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(638.250,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(951.716.116,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	(94.966.667,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(17.248.250,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	(4.900.000,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	(2.000.000,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(542.014.952,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(764.510.154,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 16	Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.213.609.357,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(209.143.664,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(280.692.770,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(76.448.000,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	(6.250.000,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	(3.000.000,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	(1.233.333,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	(6.500.000,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	(29.699.200,00)	0,00
1 3 . 7 . 01 . 35	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	(3.033.333,00)	0,00
1 3 . 7 . 02 . 01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(1.313.873.556,00)	0,00
1 3 . 7 . 03 . 16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	(15.416.666,00)	0,00
1 3 . 7 . 03 . 22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	(4.140.375,00)	0,00
1 5 . 3 . 05 . 01	Software	15.000.000,00	0,00
1 5 . 5 . 01 . 05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(5.000.000,00)	0,00
2 1 . 1 . 03 . 01	Utang PPh 21	0,00	0,00
2 1 . 1 . 03 . 02	Utang PPh 22	0,00	0,00
2 1 . 1 . 03 . 03	Utang PPh 23	0,00	0,00
2 1 . 1 . 03 . 05	Utang PPh Ps 4 (2)	0,00	0,00
2 1 . 1 . 04 . 01	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
2 1 . 1 . 07 . 05	Utang Penerimaan PFK - PP1	0,00	0,00
2 1 . 5 . 01 . 01	Utang Beban Pegawai	0,00	0,00
2 1 . 5 . 02 . 01	Utang Beban Barang dan Jasa	0,00	12.040.846,00
2 1 . 6 . 05 . 01	Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	0,00
2 1 . 7 . 01 . 01	R/K PPKD	0,00	13.077.545.535,00
3 1 . 1 . 01 . 01	Ekuitas	0,00	5.513.348.257,64
3 1 . 1 . 02 . 04	Koreksi Ekuitas Aset Tetap SKPD	0,00	(7.257.677,00)
5 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.126.792.847,00	0,00
5 1 . 1 . 01 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga	189.292.669,00	0,00
5 1 . 1 . 01 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan	194.350.000,00	0,00
5 1 . 1 . 01 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	66.195.000,00	0,00
5 1 . 1 . 01 . 06	Belanja Tunjangan Beras	105.660.780,00	0,00
5 1 . 1 . 01 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.053.923,00	0,00
5 1 . 1 . 01 . 08	Belanja Pembulatan Gaji	31.383,00	0,00
5 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tingkat Kehadiran dan Disiplin Kerja	606.094.545,00	0,00
5 1 . 1 . 07 . 01	Belanja Uang Lembur PNS	24.120.000,00	0,00
5 1 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	119.910.400,00	0,00
5 1 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.129.000,00	0,00
5 1 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.020.000,00	0,00
5 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.558.508,00	0,00
5 1 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	42.915.142,00	0,00
5 1 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	96.611.006,00	0,00

Urusan Pemerintahan	: 4 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
5.1.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	33.453.800,00	0,00
5.1.2.03.12	Belanja jasa publikasi/dokumentasi dan dekorasi	46.354.000,00	0,00
5.1.2.03.13	Belanja jasa service peralatan kantor dan rumah tangga	71.000.000,00	0,00
5.1.2.03.30	Belanja jasa pemeliharaan insfrastruktur jaringan sistem informasi keuangan daerah	59.300.000,00	0,00
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	12.937.500,00	0,00
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.995.000,00	0,00
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	110.934.921,00	0,00
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.633.500,00	0,00
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	34.860.000,00	0,00
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	252.295.000,00	0,00
5.1.2.06.03	Belanja Foto copy	97.908.500,00	0,00
5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	7.536.849,00	0,00
5.1.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	0,00
5.1.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	159.780.000,00	0,00
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	365.907.500,00	0,00
5.1.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan/lembur	8.220.000,00	0,00
5.1.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	41.000.000,00	0,00
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.475.000,00	0,00
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.609.946.513,00	0,00
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan	109.950.000,00	0,00
5.1.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.116.364.000,00	0,00
5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	753.888.154,00	0,00
5.1.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan	24.300.000,00	0,00
5.1.2.23.03	Belanja Bimbingan Teknis / workshop	142.200.000,00	0,00
5.1.2.25.01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.241.190.000,00	0,00
5.1.2.25.02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (POKJA ULP)	10.800.000,00	0,00
5.1.2.25.03	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	171.000.000,00	0,00
5.1.2.25.04	Belanja Honorarium Pengelola Kegiatan	111.200.000,00	0,00
5.1.2.25.05	Honorarium Sekretariat Kegiatan	237.625.000,00	0,00
5.1.2.26.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	443.598.600,00	0,00
5.1.2.26.03	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan Non PNS	158.050.000,00	0,00
5.1.2.31.01	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (peralatan dapur, dll)	2.000.000,00	0,00
5.1.2.32.06	Belanja Jasa Lainnya (penjaga portal, cleaning service, penjaga malam, satpam, sopir, dll)	243.050.000,00	0,00
5.2.2.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.922.000,00	0,00
5.2.2.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	17.581.750,00	0,00
5.2.2.15.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52.999.995,00	0,00
5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	128.441.250,00	0,00
5.2.2.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	17.533.250,00	0,00
5.2.2.16.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	9.922.000,00	0,00
5.2.2.17.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	117.000.000,00	0,00
5.2.2.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	17.824.500,00	0,00
5.2.2.18.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	53.298.750,00	0,00
5.2.2.19.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	2.912.000,00	0,00
5.2.3.01.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	189.500.000,00	0,00
7.3.4.01.01	Perubahan SAL	0,00	13.077.545.535,00
9.1.1.01.01	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	2.126.792.847,00	0,00
9.1.1.01.02	Beban Tunjangan Keluarga - LO	189.292.669,00	0,00
9.1.1.01.03	Beban Tunjangan Jabatan - LO	194.350.000,00	0,00

Urusan Pemerintahan	: 4 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi	: 4 . 03 . 01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
5 . 1 . 01 . 06	Beban Tunjangan Beras - LO	105.660.780,00	0,00
5 . 1 . 01 . 07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	8.053.923,00	0,00
5 . 1 . 01 . 08	Beban Pembulatan Gaji - LO	31.383,00	0,00
5 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tingkat Kehadiran dan Disiplin Kerja - LO	606.094.545,00	0,00
5 . 1 . 07 . 01	Beban Uang Lembur PNS - LO	24.120.000,00	0,00
5 . 2 . 01 . 01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	120.448.400,00	0,00
5 . 2 . 01 . 03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.162.000,00	0,00
5 . 2 . 01 . 04	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.867.000,00	0,00
5 . 2 . 01 . 05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.545.458,00	0,00
5 . 2 . 03 . 01	Beban Jasa telepon	43.301.052,00	0,00
5 . 2 . 03 . 03	Beban Jasa listrik	97.152.432,00	0,00
5 . 2 . 03 . 05	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	6.121.000,00	0,00
5 . 2 . 03 . 06	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	33.258.900,00	0,00
5 . 2 . 03 . 12	Beban jasa publikasi/dokumentasi dan dekorasi	46.354.000,00	0,00
5 . 2 . 03 . 13	Beban jasa service peralatan kantor dan rumah tangga	71.000.000,00	0,00
5 . 2 . 03 . 30	Beban Jasa pemeriharaan insfrástruktur jaringan sistem informasi keuangan daerah	59.300.000,00	0,00
5 . 2 . 05 . 01	Beban Jasa Service	12.937.500,00	0,00
5 . 2 . 05 . 02	Beban Penggantian Suku Cadang	19.995.000,00	0,00
5 . 2 . 05 . 03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	110.934.921,00	0,00
5 . 2 . 05 . 05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	8.633.500,00	0,00
5 . 2 . 06 . 01	Beban Cetak	33.518.000,00	0,00
5 . 2 . 06 . 02	Beban Penggandaan	252.295.000,00	0,00
5 . 2 . 06 . 03	Beban Foto copy	97.908.500,00	0,00
5 . 2 . 07 . 02	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	7.536.849,00	0,00
5 . 2 . 08 . 01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	0,00
5 . 2 . 11 . 01	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	159.780.000,00	0,00
5 . 2 . 11 . 02	Beban Makanan dan Minuman Rapat	365.907.500,00	0,00
5 . 2 . 11 . 06	Beban makanan dan minuman kegiatan/lembur	8.220.000,00	0,00
5 . 2 . 14 . 03	Beban Pakaian Batik Tradisional	41.000.000,00	0,00
5 . 2 . 15 . 01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.475.000,00	0,00
5 . 2 . 15 . 02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.609.946.513,00	0,00
5 . 2 . 18 . 03	Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan	109.950.000,00	0,00
5 . 2 . 19 . 01	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	1.116.364.000,00	0,00
5 . 2 . 19 . 02	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	753.888.154,00	0,00
5 . 2 . 19 . 04	Beban Jasa Konsultansi Pendampingan	24.300.000,00	0,00
5 . 2 . 23 . 03	Beban Bimbingan Teknis / workshop	142.200.000,00	0,00
5 . 2 . 25 . 01	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	2.241.190.000,00	0,00
5 . 2 . 25 . 02	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	10.800.000,00	0,00
5 . 2 . 25 . 03	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS - LO	171.000.000,00	0,00
5 . 2 . 25 . 04	Beban Honorarium Pengelola Kegiatan - LO	111.200.000,00	0,00
5 . 2 . 25 . 05	Beban Honorarium Sekretariat Kegiatan - LO	237.625.000,00	0,00
5 . 2 . 26 . 01	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber NON PNS - LO	443.598.600,00	0,00
5 . 2 . 26 . 03	Beban Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan Non PNS - LO	158.050.000,00	0,00
5 . 2 . 31 . 01	Beban Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (peralatan dapur, dll)	2.000.000,00	0,00
5 . 2 . 32 . 06	Beban Jasa Lainnya (penjaga portal, cleaning service, penjaga malam, satpam, sopir, dll)	243.050.000,00	0,00
5 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	103.500,00	0,00
5 . 7 . 01 . 04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	170.496.290,00	0,00
5 . 7 . 01 . 09	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	15.400.000,00	0,00
5 . 7 . 01 . 11	Beban Penyusutan Alat Ukur	1.537.800,00	0,00
5 . 7 . 01 . 14	Beban Penyusutan Alat Kantor	79.867.567,00	0,00
5 . 7 . 01 . 15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	81.079.775,00	0,00
5 . 7 . 01 . 16	Beban Penyusutan Komputer	123.231.358,00	0,00

Pemerintahan	: 4 . 03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	
rganisasi	: 4 . 03 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
it Organisasi	: 4 . 03 . 01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

EKENING	**URAIAN**	**DEBET**	**KREDIT**
01 . 18	Beban Penyusutan Alat Studio	10.326.168,00	0,00
01 . 19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	673.083,00	0,00
01 . 24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	200.000,00	0,00
01 . 35	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.400.000,00	0,00
02 . 01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	95.281.137,00	0,00
03 . 16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	2.500.000,00	0,00
03 . 22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	814.500,00	0,00
06 . 05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.000.000,00	0,00
	JUMLAH	31.673.222.496,64	31.673.222.496,64